

**Judul** : Kementerian BUMN ngotot impor  
**Tanggal** : Rabu, 24 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 3

| KEBUTUHAN KERETA REL LISTRIK |

## KEMENTERIAN BUMN NGOTOT IMPOR

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetap memilih opsi mengimpor rangkaian kereta rel listrik bukan baru dari Jepang untuk meremajakan armada milik PT Kereta Commuter Indonesia.

Lorenzo A. Mahardhika & Hendra Wibawa  
redaksi@bisnis.com

**S**taf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa opsi mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tetap diajukan kendati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak merekomendasikan impor. Kementerian BUMN, katanya, terus berupaya mencari solusi untuk para pengguna layanan KRL Jabodetabek.

Saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter selaku operator KRL Jabodetabek dan KRL Solo—Yogyakarta membutuhkan pengganti rangkaian kereta yang akan 'dipensiunkan' pada 2023. Di sisi lain, pembuatan KRL dari dalam negeri yang dilakukan PT Industri Kereta Api (Inka) baru terealisasi 2 tahun mendatang. Oleh karena itu, dia menegaskan kebutuhan impor untuk jangka pendek menjadi pilihan yang paling memungkinkan.

"Saat ini kondisinya [KRL buatan dalam negeri] tidak memungkinkan, makanya kami mengajukan opsi impor itu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (23/5).

Akan tetapi, Arya tidak menyebutkan secara spesifik rencana

impor KRL bekas asal Jepang untuk tahun ini termasuk kepastian rekomendasi dan izin impor dari kementerian teknis.

Dia juga tidak berkomentar banyak soal rencana tersebut termasuk kementerian teknis akan melakukan rapat terakhir dalam waktu dekat.

Arya menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan BPKP terkait dengan hasil audit yang dikeluarkan lembaga tersebut melalui sejumlah rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga.

"Kalau regulator kan bukan kita yang menentukan boleh tidak bolehnya. Untuk rapat itu tanya ke teman-teman di Kemenko Maritim dan Investasi saja," katanya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebutkan telah bertemu dengan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Senin (22/5).

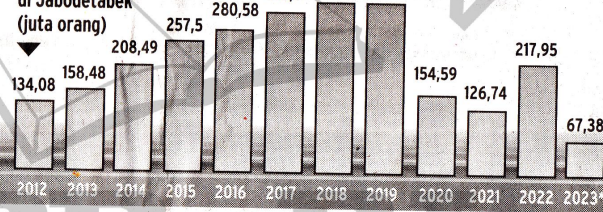
Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023 sudah bisa dilakukan.

Andre mengatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan satu kali rapat untuk memastikan rencana impor tersebut.

Secara terpisah, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita

### IMPOR KRL BEKAS TAK DISARANKAN

Jumlah Penumpang PT Kereta Commuter Indonesia di Jabodetabek (juta orang)



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan penambahan armada melalui impor kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang. Sebaliknya, BPKP merekomendasikan operator KRL memesan KRL baru dan melakukan retrofit KRL di dalam negeri.

Irawati mendukung rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang asalkan dapat mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang di masa depan.

Pada dasarnya pihaknya meminta layanan KRL Jabodetabek untuk tetap berkelanjutan dan mengedepankan keselamatan serta dapat mengantisipasi lonjakan penumpang ke depannya.

Adita menuturkan, Kemenhub juga menunggu proses pembuatan rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api atau Inka. Adapun, rangkaian kereta buatan Inka ditargetkan selesai pada 2025.

"Mengetahui prosesnya [pembuatan

KRL] ini ditangani oleh PT Kereta Api Indonesia langsung," kata Adita saat dihubungi pada Selasa (23/5/).

Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat impor rangkaian KRL bekas dari Jepang merupakan opsi paling memungkinkan guna menjaga kapasitas angkut KRL Jabodetabek.

Dia menilai impor KRL perlu dilakukan guna menjaga kapasitas angkut KRL Jabodetabek di tengah pertumbuhan jumlah penumpang.

Aditya menuturkan pilihan se-

lain impor seperti retrofit atau penyesuaian frekuensi perjalanan memang dapat dilakukan. Namun, dia mengatakan opsi itu akan berdampak pada berkurangnya daya angkut KRL Jabodetabek.

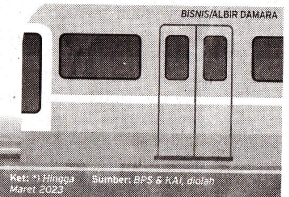
Dia menjelaskan opsi retrofit akan berdampak pada berkurangnya jumlah KRL yang beroperasi.

Selain itu, opsi retrofit perlu memperhitungkan ketersediaan suku cadang KRL serta memastikan kelayakan operasi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memilih untuk mengikuti hasil kajian BPKP terkait dengan kebijakan impor KRL bekas. ■



Utang WSKT, PTPP, WIKI, dan ADHI Menggantung, Holding BUMN Karya Jadi Solusi?



Ket: \*Fittiguz Maret 2023 Sumber: BPS & KAI, diolah